

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama dalam menentukan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah dalam hal otonom daerah dan juga pendapatan asli daerah menjadi gambaran apakah berhasil atau tidak kemandirian kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi daerah (Saleh, S. 2003).

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa adanya imbalan langsung yang diterima, guna untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 jenis pajak daerah terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/kota:

1) Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan karena status kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak karena adanya transaksi atau pemindahtanganan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar kendaraan yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

d) Pajak Pengambilan Air Permukaan

Pajak pengambilan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2) Pajak Kabupaten/kota

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas jasa layanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi pengunjung dari luar

daerah atau sedang dalam perjalanan untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah tempat yang menyediakan berbagai makanan dan/atau minuman yang kemudian dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas pengadaan reklame atau iklan. Reklame merupakan media yang berdasarkan bentuk dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial,

dipergunakan untuk mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh orang umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau bukan oleh PLN. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerang jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas pengambilan bahan galian oleh orang pribadi atau badan dengan adanya peraturan perundang-undangan.

g) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas pengadaan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
- 2) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- 3) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada individu secara pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada dasarnya, dalam retribusi ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan,
- b) Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan,
- c) Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Secara Terpisah

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga salah satu pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi yang termasuk dalam pendapatan asli daerah meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Hak penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa/Giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai sebab dari penjualan, pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah daerah.

2. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari “pari” yang memiliki arti berkali-kali atau berulang kali dan “wisata” yang artinya perjalanan. Menurut Schullard (1910) pariwisata merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang asing dari suatu Negara dan melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain.

Pariwisata secara umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usah yang terkait di bidang tersebut. Suatu perjalanan akan dikatakan pariwisata jika dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain
2. Perjalanan dilakukan lebih dari 24 jam atau sudah menempuh perjalanan kurang lebih sejauh 100 mill dari perbatasan orang itu tinggal

3. Tujuan perjalanan hanya untuk bersenang-senang tidak untuk mencari pekerjaan
4. Uang yang dibelanjakan wisatawan dibawa dari tempat asal tinggal dan bukan dari peroleh hasil perjalanan wisatawan.

b. Jenis Pariwisata

Arjana (2015), jenis pariwisata dilihat dari berbagai aspek, sifat, dan dimensi pariwisata sebagai berikut:

- 1) Jenis Pariwisata Menurut Letak
 - a) Pariwisata lokal, perjalanan wisata yang memiliki jarak dekat yang dapat ditempuh dengan beberapa jam seperti wisata ke luar kota.
 - b) Pariwisata nasional, perjalanan wisata yang dilakukan dalam suatu Negara.
 - c) Pariwisata mancanegara, perjalanan wisatawan yang berwisata ke luar negeri dan wisatawan yang masuk dari luar negeri,
- 2) Jenis Pariwisata Menurut Waktu Kunjungan
 - a) Pariwisata okasional, orang-orang yang melakukan perjalanan wisata karena ada penyelenggaraan suatu kegiatan tertentu atau adanya peristiwa tertentu.
 - b) Pariwisata musiman, orang-orang yang melakukan perjalanan wisata karena adanya musim panas untuk menikmati matahari atau musim dingin yang berselju dan lain sebagainya.

- 3) Jenis Pariwisata Menurut Tujuan
 - a) Pariwisata bisnis
 - b) Pariwisata liburan
 - c) Pariwisata pendidikan
 - d) Pariwisata keagamaan atau spiritual
- 4) Jenis Pariwisata Menurut Biaya
 - a) Pariwisata mewah, fasilitas transportasi yang dipilih berupa pesawat dan kapal pesiar, dan biaya akomodasi yang dibayar tinggi pada hotel berbintang empat atau lima.
 - b) Pariwisata yang berbiaya sedang
 - c) Pariwisata berbiaya murah, fasilitas transportasi yang dipilih serba murah tetapi tetap aman dan tujuan wisata tercapai.
- 5) Jenis Pariwisata Menurut Obyek Wisata
 - a) Pariwisata budaya
 - b) Pariwisata kesehatan
 - c) Pariwisata perdagangan
 - d) Pariwisata olahraga
 - e) Pariwisata politik
 - f) Pariwisata keagamaan atau spiritual
 - g) Pariwisata alam
 - h) Wisata laut atau pantai yang dikembangkan

c. Dampak Pariwisata

Aktivitas pariwisata menggerakkan pelaku pariwisata bidang ekonomi karena adanya supply dan demand terhadap produk barang dan jasa. Sirkulasi peredaran uang, barang dan jasa akan sangat luas sehingga ekonomi akan cepat berkembang. Jika wisatawan yang datang ke destinasi tersebut sangat banyak dalam jangka waktu tertentu, menggunakan sumber daya dan fasilitas yang biasanya akan mengeluarkan uang untuk berbagai keperluan selama liburannya, maka akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut baik langsung maupun tidak langsung dan akan menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Ismayanti (2010) mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap perekonomian sebagai berikut:

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja
- 4) Dampak terhadap harga-harga
- 5) Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan
- 6) Dampak terhadap kepemilikan dan pengendalian
- 7) Dampak terhadap pembangunan
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah

d. Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Pariwisata

Menurut UN-WTO, pemerintah memiliki peran dalam menentukan kebijakan strategis dan bertanggungjawab terhadap beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Membangun kerangka-kerangka operasional dimana sektor publik dan wisata terlibat dalam menggerakkan berdirinya pariwisata.
- 2) Menyediakan fasilitas untuk kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang ditetapkan dalam pariwisata, perlindungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
- 3) Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan sarana komunikasi.
- 4) Membangun dan memberikan fasilitas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan adanya jaminan pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam sektor pariwisata.
- 5) Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang dapat disusun dalam rencana kongkret yang meliputi sebagai berikut: evaluasi kekayaan aset pariwisata alam dan budaya serta dengan mekanisme perlindungan dan pelestarian, identifikasi dan kategori produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan (performance) pariwisata dengan mengolaborasikan

program untuk keperluan pembiayaan dalam aktivitas pariwisata baik untuk sektor publik ataupun swasta.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Jumlah wisatawan merupakan seberapa banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke suatu negara atau daerah dalam satu periode. Jika jumlah pengunjung wisatawan dapat meningkat setiap tahunnya di Pulau Jawa maka akan mempengaruhi angka jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.

2. Pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Obyek wisata merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik agar masyarakat ingin berkunjung. Semakin banyak jumlah obyek wisata yang tersedia maka akan menarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata khususnya di Pulau Jawa yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap pendapatan sektor pariwisata.

3. Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Hotel merupakan fasilitas yang yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penginapan, namun juga dapat berfungsi untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan.

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan. Dengan demikian maka banyaknya pendirian hotel- hotel di Pulau Jawa, apabila hotel dapat di kelola dengan baik dan mampu menarik pengunjung untuk menginap di hotel maka akan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan daerah melalui pajak penghasilan

4. Pengaruh Jumlah Restoran dan Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Jumlah restoran dan rumah makan merupakan banyaknya restoran ataupun rumah makan yang disediakan sebagai sarana pendukung untuk para wisatawan. Restoran dan rumah makan menyajikan hidangan kepada masyarakat serta menyediakan tempat guna menikmati hidangan, dan juga menetapkan biaya tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

Dengan berdirinya restoran dan rumah makan di daerah wisata maka akan memenuhi kebutuhan para wisatawan yang datang di daerah tersebut, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pengelola restoran maupun para wisatawan. Bagi pengelola restoran dan rumah makan keuntungan dapat diperoleh dari hasil penjualan, sedangkan bagi wisatawan keuntungan dapat diperoleh melalui kepuasan wisatawan terhadap kebutuhan mereka. Selain itu apabila jumlah restoran meningkat maka juga akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan pendapatan asli daerah sektor pariwisata melalui pajak penghasilan.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan sebagai berikut:

Zelvian Shella, Said Muhammad, dan Muhammad Nasir (2014), menganalisis penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Banda Aceh dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, jumlah hotel dan lama tinggal wisatawan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. Jenis analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari keempat variabel tersebut hanya jumlah obyek wisata yang tidak berpengaruh signifikan.

Abu Rizal, Joko Priyono (2016), menganalisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan daerah. Jenis analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan menggunakan data time series selama lima tahun (2010-2014). Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah.

Ahmar, Nurlinda (2012), menganalisis peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palopo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah tarif dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan

bahwa hubungan antara retribusi pariwisata dengan pendapatan asli daerah Kota Palopo berpengaruh signifikan.

Femy Nadia Rahma, Herniwati Retno Handayani (2013), menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Kudus. Tujuan ini untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. Jenis analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata.

I Kadek Budi Praga Swantara, Ida Bagus Darsana (2017), menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan, pendapatan PHR, dan penerimaan retribusi obyek wisata terhadap PAD Kabupaten Gianyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kunjungan wisatawan, pendapatan PHR, dan penerimaan retribusi obyek wisata terhadap PAD. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian ini adalah kunjungan wisatawan, pendapatan PHR, dan penerimaan retribusi obyek wisata berpengaruh positif terhadap PAD.

Denny Cessario Sutrisno (2013), menganalisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah hotel, PDRB, dan pengaruh jumlah

obyek wisata, jumlah hotel, PDRB secara bersama-sama terhadap pendapatan retribusi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jenis analisis yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan *common effect model* dan pada tahun 2007-2011. Hasil penelitian ini adalah semua variabel independen yang meliputi jumlah obyek wisata, jumlah hotel, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.

Riska Arlina, Evi Yulia Purwanti (2013), menganalisis Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, investasi di industri pariwisata, nilai kurs USD, dan faktor keamanan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dan pada tahun 1991-2012. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara serta nilai kurs USD berpengaruh signifikan, sedangkan variabel investasi dan faktor keamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

Kuang, Yi-Fan Tsi Ph.D (2009), menganalisis "*The effect of tourism growth on economic growth : A quantile regression analysis*". Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan jumlah wisatawan terhadap Pertumbuhan ekonomi di taiwan. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda dan pada tahun 1965-2005. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertumbuhan wisatawan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi pada tingkat distribusi (0,3 sampai 0,9 quantiles) di Taiwan. Namun, Pertumbuhan wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat distribusi (0,1 sampai 0,2 quantiles) di Taiwan.

Toader (2013), menganalisis "*Network, Clusters and Innovation in Romanian Tourism*". Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis relevansi dari teori jaringan, cluster, dan bentuk inovasi pariwisata. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jaringan dan cluster dilihat oleh banyak ahli sebagai pendekatan inovatif dalam pengembangan sektor pariwisata. Dalam penelitian ini juga disebutkan contoh mengenai kerjasama sektor pariwisata Rumania di tingkat nasional, regional, dan lokal.

Costa, Monte, dan Fernandes (2013), menganalisis *Tourism Revenue For The North Region Of Portugal: An Econometric Analysis*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat hunian hotel, wisatawan dalam negeri dan wisatawan asing, jumlah hotel, jumlah biro akomodasi, rata-rata lama menginap wisatawan dalam negeri dan wisatawan asing, dan tingkat fingsi pariwisata regional terhadap pendapatan asli sektor pariwisata di wilayah utara Portugal. Metode analisis penelitian ini adalah regresi linear berganda dan pada tahun 2006-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Tingkat hunian hotel wisatawan dalam negeri dan wisatawan asing, dan jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan, Rata-rata lama menginap wisatawan dalam negeri dan asing berpengaruh negatif dan signifikan.

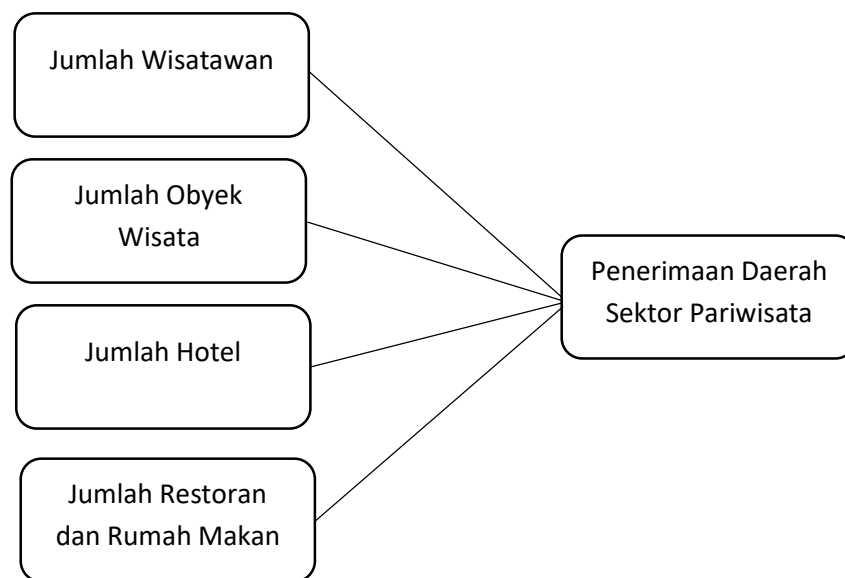
D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Variabel Jumlah Wisatawan diduga berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Pulau Jawa
2. Variabel Jumlah Obyek Wisata diduga berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Pulau Jawa
3. Variabel Jumlah Hotel diduga berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Pulau Jawa
4. Variabel Jumlah Restoran dan Rumah Makan diduga berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Pulau Jawa

E. Model Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Jumlah Wisatawan, variabel Jumlah Obyek Wisata, variabel Jumlah Hotel, dan variabel Jumlah Restoran dan Rumah Makan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian

